

BAB II
LANDASAN TEORITIS
TENTANG KORELASI STATUS SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DENGAN
TINGKAT PARTISIPASINYA DALAM KEGIATAN DAKWAH BIL HAL

A. Pembahasan Tentang Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan

1. Pengertian Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan.

Yang dimaksud dengan status sosial ekonomi masyarakat dalam skripsi ini adalah kondisi status sosial ekonomi suatu keluarga, di mana keluarga tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat nelayan.

Adapun pengertian kondisi status sosial ekonomi menurut FS. Chapin dalam bukunya Kaare Svalastoga adalah sebagai berikut:

Kondisi status sosial ekonomi dapat didefinisikan sebagai posisi yang ditempati individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlakutentang pemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya.¹

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk melihat atau menentukan kondisi status sosial ekonomi seseorang atau suatu keluarga, kita dapat menilainya dari empat hal

¹Kaare Svalastoga, Sosial Differentiation, Terjemahan Alimandau SU, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 26

yaitu:

- a. Pemikiran kultural
- b. Pendapatan Efektif
- c. Pemilikan barang-barang
- d. Partisipasi dalam aktivitas kelompok

Definisi kondisi status sosial ekonomi masyarakat dengan menggunakan empat indikator tersebut di atas dinilai oleh sebagian ahli sosiologi mengandung kelemahan, yaitu terdapat atau dapat menimbulkan kekeburan dalam merumuskan definisi operasionalnya karena tiap-tiap indikator mengandung pengertian yang amat luas.

Menurut Warner yang dikutip oleh Kaare Svalas toga adalah bahwa: Indikator yang digunakan untuk menentukan kondisi status sosial ekonomi suatu keluarga adalah ada empat komponen sebagai berikut:

- a. Pekerjaan
- b. Sumber Pendapatan
- c. Tipe rumah, dan
- d. Kawasan tempat tinggal.²

² Ibid, hlm. 27

Pendapat Warner tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban terhadap kritik yang dilontarkan kepada Chapin namun demikian menurut hemat penulis, status sosial ekonomi suatu keluarga dapat dilihat dari status ekonominya di tengah-tengah anggota masyarakat yang lain. Karena berbicara masalah ekonomi keluarga kita tidak lepas dari pembahasan tentang pekerjaan, pendapatan, dan kebutuhan-kebutuhan dari keluarga tersebut yang harus dipenuhi agar mereka dapat hidup ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini sebagaimana pendapat Kaare Svalastoga yang mendefinisikan Status ekonomi "Sebagai barang dan jasa yang dapat dibelinya di pasar pada waktu tertentu".³

Berangkat dari pengertian tersebut diatas maka dapat diambil suatu pengertian bahwa status sosial ekonomi keluarga adalah kemampuan keluarga untuk membeli barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan tiap-tiap anggota keluarga tersebut pada waktu tertentu. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain adalah tidak sama, atau dengan kata lain kondisi status sosial ekonomi tiap-tiap keluarga adalah berbeda.

3). Ibid, hlm. 41

Dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, termasuk di dalamnya adalah masyarakat nelayan selalu terdapat stratifikasi sosial dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek ekonomi.

Berdasarkan hasil Survy biaya hidup (SBH) yang diadakan oleh kantor statistik Jawa Timur, terdapat tiga strata masyarakat bila ditinjau dari kondisi sosial ekonomi keluarga, adapaun ketiga strata itu adalah:

a. Keluarga Miskin

Yang termasuk katagori keluarga miskin adalah keluarga yang pengeluarannya perbulan kurang dari Rp. 100.000,00.

b. Keluarga Menengah

Yang termasuk katagori keluarga menengah adalah keluarga yang pengeluarannya per bulan berada antara Rp. 100.000,00 hingga Rp. 250.000.00.

c. Keluarga yang mampu

Yang termasuk katagori keluarga yang mampu adalah mereka yang pengeluarannya per bulannya lebih dari Rp. 250.000,00.

Dalam survey biaya hidup tersebut tiap keluarga dihitung mempunyai 5 anggota keluarga, sehingga pengeluaran rata-rata perkapita perbulan bagi keluarga miskin - adalah kurang dari Rp.20.000,00; pengeluaran rata-rata perkapita perbulan bagi keluarga menengah adalah antara Rp. 20. 000. 00 per kapita per bulan hingga Rp. 50.

000,00, dan pengeluaran rata-rata per kapita perbulan bagi keluarga yang mampu adalah lebih dari Rp.50.000,00.⁴

Sedangkan pengertian hidup miskin atau kebutuhan fisik minimum bagi seseorang pada suatu rumah tangga menurut Samir Ridwan dan Torkel Alfthan dalam bukunya Mulyanto Sumardi adalah meliputi:

- a. Makan
- b. Pakaian
- c. Perumahan
- d. Kesehatan
- e. Pendidikan
- f. Air dan Sanitasi, serta Partisipasi.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, serta tidak mampu berpartisipasi dalam komunitasnya atau meskipun kebutuhan fisik minimum itu dapat dipenuhi tetapi masih dibawah ukuran rata-rata yang ber

⁴Suroso Imam Jazuli, Masalah Kemiskinan Di Indonesia Dan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Bojonegoro, Makalah Dalam Seminar Regional Upaya Penanggulangan - Kemiskinan Dan Prospek Pengembangan Lembaga- Lembaga Bantuan Sosial Di Bojonegoro, 1993, hlm. 6

⁵Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers (ed), Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 2

berlaku dalam wilayah masyarakat, tempat dimana keluarga tersebut hidup, maka keluarga tersebut termasuk dalam kategori keluarga miskin. Sedangkan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum tersebut maka mereka termasuk keluarga yang hidup di atas garis kemiskinan.

Tolak ukur kemiskinan dengan menggunakan tingkat pemenuhan kebutuhan fisik minimum ini menurut penulis telah menyentuh aspek kemanusiaan dan keadilan. Hal ini apabila dibandingkan dengan tolak ukur kemiskinan yang dikemukakan oleh Sayogya, yaitu dengan menggunakan batas minimal jumlah kalori yang dikonsumsi (oleh setiap anggota keluarga yang diambil persamaannya dengan 360 kg. beras per kapita per tahun atau 30 kg. beras per kapita per bulan.⁶

Oleh karena itu penulis cenderung mengikuti pendapat yang menggunakan kebutuhan fisik minimum sebagai garis batas kemiskinan dalam arti orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum, dan orang yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik minimum tersebut maka orang tersebut termasuk orang yang berpenghasilan

⁶Nasihani, Membuat Peta Kemiskinan Yang lebih Tepat, Jawa Pos, 1993, hlm. 4

menengah dan yang mampu. Untuk memudahkan perhitungan dalam menentukan beberapa orang atau keluarga yang tergolong miskin, menengah dan mampu maka untuk daerah Jawa Timur ditentukan angka nominal Rp. 24.380,50 per bulan angka sebesar ini ditaksir telah cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum tersebut per kapita per bulan.

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah keluarga nelayan, maka tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu keluarga itu tergolong miskin menengah ataukah yang mampu adalah berdasarkan "tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga", yang batasan-batasannya menurut Parsudi Suparlan dalam bukunya A.W. Wijaya adalah:

"Tolak ukur kebutuhan relatif perkeluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi guna sebuah keluarga dapat melangsungkan kehidupannya secara sederhana tapi memadai sebagai warga masyarakat yang layak. Tercakup dalam tolak ukur kebutuhan relatif per keluarga ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan biaya sewa rumah dan mengisi rumah dengan peralatannya rumah tangga yang sederhana tapi memadai, biaya untuk memelihara kesehatan dan untuk pengobatan biaya untuk menyekolahkan anak-anak, dan biaya-biaya untuk sandang yang sewajarnya dan pangan yang sederhana tetapi mencukupi dan memadai."

A.W. Wijaya (ed), Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 129

Berdasarkan penjelasan Parsudi Suparlan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan klasifikasi keluarga yang ditetapkan oleh kantor statistik Jawa Timur kedalam keluarga miskin, menengah dan yang mampu maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal suatu keluarga adalah Rp. 100.000,00 per bulan sehingga keluarga yang pengeluarannya kurang dari Rp. 100.000,00 hingga Rp. 250.000,00 per bulan adalah tergolong keluarga menengah, dan keluarga yang pengeluarannya per bulan lebih dari Rp. 250.000,00 per bulan adalah tergolong keluarga yang mampu.

Klasifikasi kondisi status sosial ekonomi masyarakat nelayan berdasarkan pengeluaran per keluarga telah kita bahas, maka pembahasan selanjutnya adalah tentang batas kemiskinan berdasarkan pendapatan atau penghasilan rata-rata per keluarga per tahun, karena biaya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut membutuhkan sumber dana yang disebut sebagai pendapatan atau penghasilan setiap hari.

Adapun tolak ukur yang dipergunakan untuk mengetahui siapa yang sebenarnya dikategorikan sebagai keluarga kaya atau mampu bila ditinjau dari aspek pendapatan seseorang, menurut hukum Islam adalah dengan menggunakan Garis Batas Nisab. Hal ini sebagaimana penda

pat Suroso Imam Jazuli adalah sebagai berikut:

"Islam memberikan batasan yang cukup jelas antara orang yang mampu/wajib zakat dan orang miskin atau orang yang merupakan salah satu as naf yang berhak memperoleh zakat, dimana batasan orang mampu/orang yang wajib mengeluarkan zakat ialah orang yang telah mempunyai harta atau dalam setiap tahunnya orang tersebut telah mampu membentuk pendapatan atau penghasilan telah lebih dari satu nisab yaitu diperhitungkan setara dengan 95 gram emas murni atau senilai dengan Rp. 2.185.500,- (94 gram X Rp. 23.250,-) untuk tahun 1990.⁸

Berdasarkan pendapat tersebut maka yang termasuk keluarga miskin adalah mereka yang pendapatan pertahunnya kurang dari Rp. 2.185.500,00. Sedangkan keluarga yang tergolong mampu adalah mereka yang pendapatan pertahunnya lebih dari Rp. 2.185.500,00. Hanya saja pendapatan tersebut di atas, tidak dilengkapi dengan penjelasan tentang sifat dari pendapatan itu bersih atau kotor.

Untuk mengetahui penjelasan tentang pendapatan sifatnya sebagai pendapatan bersih atautkah kotor kita terlebih dahulu harus menelaah penafsiran para ulama' tentang kata "Al Masakin". Sebab al Masakin sebagai satu golongan yang wajib diberi zakat oleh orang yang mampu, sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa kriteria orang kaya dan orang yang miskin menurut Islam adalah sebagai berikut:

⁸Suroso Imam Jazuli, Op Cit, hlm. 3

"Bahwa yang wajib zakat itu ialah orang yang kaya/ mampu saja (ghaniy, bhs. Arab), dan kriteria kaya menurut Islam, ialah orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nisabnya (lebih kurang senilai 93,6 gram emas), sedangkan ia telah mencukupi kebutuhan pokok keluarganya, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan.⁹

Pendapat Sayyid Sabiq tersebut secara jelas menegaskan bahwa kriteria keluarga kaya atau yang mampu itu ialah keluarga yang mempunyai pendapatan bersih senilai 93,6 gram emas murni.

Dengan demikian maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kriteria orang miskin menurut Islam adalah orang atau keluarga yang pendapatan bersih pertahunnya kurang dari satu nisab zakat, yaitu diperhitungkan setara dengan 94 gram emas murni atau senilai Rp. 2.185.500, 00 . Sedangkan orang atau keluarga kaya atau mampu ialah keluarga yang pendapatan bersih pertahunnya senilai Rp. 2.185.500,00 atau lebih.

Dari pendapat beberapa ahli tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan definisi operasional dari kondisi status sosial ekonomi keluarga nelayan sebagai berikut:

Kondisi status sosial ekonomi keluarga nelayan adalah posisi yang ditempati oleh suatu keluarga nelayan yang berhubungan dengan ukuran rata-rata penda

⁹ H. Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hlm. 239

patan dan pengeluaran keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga sehingga keluarga tersebut dapat melangsungkan kehidupannya sebagai warga masyarakat tempat dimana mereka hidup.

Adapun klasifikasi dari kondisi status sosial ekonomi masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Nelayan Miskin

Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan bersih perkeluarga kurang dari satu nisab zakat atau Rp. 2.185.500,00 per tahun atau kurang dari Rp. 182.125,00 per bulan.
- Pengeluaran per keluarga masih kurang dari Rp. 100.000,00 per bulan untuk lima (5) orang anggota keluarga atau masih kurang dari Rp. 20.000,00 per kapita per bulan.

b. Keluarga Nelayan Menengah

Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan bersih perkeluarga kurang dari satu nisab zakat atau Rp. 2.185.500,00 per tahun atau kurang dari Rp. 182.125,00 per bulan.
- Pengeluaran keluarga sebesar antara Rp. 100.000,00 hingga Rp. 250.000,00 per bulan untuk lima(5) orang anggota keluarga.

c. Keluarga Nelayan Yang Mampu

Indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pendapatan bersih per keluarga mencapai satu nisab zakat atau Rp. 2.185.500,00 per tahun atau lebih dari Rp.182.125,00 per bulan.
- Pengeluaran per bulan telah lebih dari Rp. 250.000,00 untuk lima orang anggota keluarga.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Status Sosial Masyarakat Nelayan.

Berbicara masalah faktor-faktor yang mempengaruhi status sosial ekonomi masyarakat nelayan berarti kita membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan keluarga nelayan tersebut ada yang miskin, menengah dan ada yang mampu.

Dalam pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bahwa indikator yang digunakan untuk menentukan kondisi status sosial ekonomi suatu keluarga adalah berdasarkan jumlah pendapatan dan pengeluaran per keluarga dalam jangka waktu tertentu (dihitungpertahun/per bulan). Dengan demikian secara induktif kita dapat menentukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi status sosial ekonomi keluarga nelayan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendapatan

Pengertian pendapatan keluarga menurut -

Maslina Bangun S dan Anidal H. dalam bukunya Mulyanto Sumardi adalah sebagai berikut: Pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga.¹⁰

Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang dari usahanya sendiri sebagaimana dilakukan para nelayan yang mencari nafkah dengan cara menangkap ikan dilaut adalah termasuk kategori pendapatan dari sektor informal. Adapun pengertian dan pembagian pendapatan sektor informal menurut Biro Pusat Statistik ialah sebagai berikut:

Pendapatan sektor informal yaitu segala penghasilan baik berupa uang atau barang yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi dari sektor informal. Pendapatan ini berupa :

1. Pendapatan dari usaha, yang meliputi:
 - a. Hasil bersih dari usaha sendiri
 - b. Komisi
 - c. Penjualan dari kerajinan rumah
2. Pendapatan dari infestasi
3. Pendapatan dari keuntungan sosial.¹¹

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pendapatan masyarakat nelayan tidak saja berasal dari hasil menangkap ikan dilaut, akan tetapi meliputi

¹¹ Mulyanto Sumardi dan Hans-Dieter Evers(ed), Op Cit., hlm. 322

¹² Ibid, hlm. 94-95

penghasilan dari usaha lain yang dilakukan oleh anggota keluarga tersebut, misalnya ibu rumah tangga yang memiliki usaha wiswasta dan sebagainya, dimana penghasilan dari usaha tersebut seluruhnya disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga.

Besarnya hasil usaha seseorang telah ditentukan oleh Allah Swt. Karena berbicara masalah hasil usaha atau pendapatan berarti kita berbicara masalah riziki yang pembagiannya sepenuhnya terserah kepada otoritas Allah Swt. Dia-lah yang telah menentukan rizeki bagi setiap makhluknya, termasuk rizeki pada keluarga nelayan. Sebagaimana Firman Allah Swt. Surat Ar Ra'du:13: yang berbunyi sebagai berikut:

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا يَبْتَغِيهِمْ (الآية ١٣)

Artinya: "... Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali jika mereka merubah keadaan mereka sendiri..." (QS. 13:11).¹²

Bukti dari firman Allah Swt. tersebut adalah terdapat perbedaan yang menyolok antara pendapatan nelayan tradisional yang tidak menggunakan motor pada perahunya dengan nelayan maju yang telah menggunakan motor pada perahu penangkap ikannya. Pendapatan nelayan tradisional hanya Rp. 142.628,00 per kapita per

¹²⁾ Departement Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, PT. Bumi Restu, Jakarta, 1988, hlm. 370

tahun, sedangkan pendapatan nelayan maju mencapai Rp. 669.254,00 per kapita per tahun. Mereka yang telah mampu memanfaatkannya teknologi perikanan ternyata memiliki kondisi status sosial ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan nelayan tradisional.

b. Faktor Pengeluaran

Yang dimaksud dengan pengeluaran dalam hal ini adalah sebagaimana pendapat R.M. Sundrum dalam bukunya Mulyanto Sumardi bahwa beliau membagi pengeluaran menjadi:

- 1) Pengeluaran makanan
- 2) Pengeluaran perumahan
- 3) Pengeluaran Pakaian
- 4) Pengeluaran barang-barang dan jasa-jasa
- 5) Pengeluaran yang mengkonsumsi yang meliputi:
 - a. Pengeluaran untuk usaha, dan
 - b. Pengeluaran non konsumsi dan lain-lain pembayaran.¹³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka pengertian pengeluaran keluarga adalah pengeluaran biaya yang digunakan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga yang terdiri atas kebutuhan makan, perumahan, pakaian, barang-barang non konsumsi serta jasa-jasa, dan lain-lain pembayaran.

Besar kecilnya angka pengeluaran per keluarga cenderung berbeda antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

¹³ Mulyanto Sumardi, Op Cit, hlm. 94

Suatu keluarga dengan anggota yang melebihi angka rata-rata akan berbeda keadaannya dengan keluarga yang hanya mempunyai anggota 5 orang meskipun kedua keluarga tersebut mempunyai pendapatan dengan angka yang sama. Sebagai suatu gambaran, misalnya kedua keluarga tersebut mempunyai pendapatan rata-rata Rp. 500.000,00 per bulan. Keluarga yang pertama mempunyai 10 orang anggota keluarga. Apabila pengeluaran per kapita masing-masing anggota Rp. 50.000,00 maka biaya pengeluaran per keluarga untuk keluarga yang pertama adalah Rp. 500.000,00 per bulan. Ini berarti keluarga tersebut tidak mempunyai sisa pendapatan sama sekali, dan dengan demikian keluarga tersebut tidak mampu mengumpulkan pendapatan sebesar satu nisab zakat per tahun. Sedangkan keluarga yang hanya mempunyai lima (5) orang anggota keluarga dengan pengeluaran Rp. 50.000,00 per kapita per bulan masih mempunyai sisa pendapatan Rp. 250.000,00 per bulan.

Gambaran tersebut di atas hanya suatu gambaran tentang perbedaan kondisi sosial ekonomi yang disebabkan oleh faktor pengeluaran antara keluarga yang satu dengan yang lain, mempunyai tahap perkembangan keluarga yang berbeda. Tentu saja keluarga yang tahap perkembangannya lebih cepat mempunyai pola konsumsi yang lebih tinggi dan sebaliknya.

B. Pembahasan Tentang Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Kegiatan Dakwah Bil Hal

1. Pengertian Dakwah

Jika terdengar pada telinga kita kata dakwah maka konotasi yang ada adalah gambaran seseorang yang sedang berdiri di podium (mimbar) menyampaikan pesan-pesan pidato dihadapan massa (jama'ah) yang banyak jumlahnya. Konotasi tersebut tidaklah terlalu salah tapi juga tidak betul, gambaran seperti tersebut hanyalah merupakan salah satu metoda dakwah yang sering dipakai orang karena kepraktisan dan keumumannya. Lagipula dakwah sebagai metoda seperti tersebut diatas sudah dipakai orang sejak dahulu kala.¹⁴⁾

Dakwah pada hakekatnya, mempunyai arti ajakan, berasal dari kata da'a-yad'u-dakwatan (dakwah) yang berarti mengajak. Dalam pengertian yang lebih khusus dakwah berarti mengajak baik pada diri sendiri atau pun pada orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dan rasul-Nya serta meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang tercela (yang dilarang) oleh Allah dan rasul-Nya pula. Jadi dakwah dalam pengertian khusus ini bisa di

¹⁴⁾. Drs. Slamet Muhaimin Abda, Prinsip-Prinsip Metodologi Dakwah, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 29-30

identikkan dengan amar ma'ruf nahi munkar, yang artinya suatu usaha untuk menggerakkan orang lain dan dirinya sendiri melakukan kebajikan-kebajikan. Dalam hal ini amar ma'ruf mencakup hal-hal yang amat luas dan meliputi segala aspek kehidupan manusia. Amar ma'ruf dapat bermakna mempertahankan yang baik dan menjadikannya lebih baik lagi. Yang sudah baik dipertahankan lagi untuk lebih abadi dan lestari di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

Dalam pengertian yang sama pula dakwah berarti menyampaikan, Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً . البخاري .

Artinya: "Sampaikan apa yang datang dariku walaupun satu ayat."¹⁶

Pengertian-pengertian tersebut di atas telah jelas bahwa dakwah semata-mata merupakan ajakan, usaha penyampaian dari seseorang kepada orang lain tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Dakwah bukanlah suatu paksaan kepada orang lain, dakwah hanyalah merupakan usaha atas suatu kewajiban yang dipikulkan Allah kepada manusia yang mengaku dirinya telah islam masalah orang yang diajak akan menerima atau justru menol-

¹⁵ Jamaluddin Kaffie, Pengantar Ilmu Dakwah, PN. Karunia, Surabaya, 1988, hlm. 5

¹⁶ Ibid, hlm. 4

lak adalah urusan Allah, manusia tidak mempunyai kemenangan menetapkan keputusan hati manusia.¹⁷

Sedangkan menurut istilah, para ulama' memberikan ta'rif (definisi) bermacam macam antara lain:

a. HSM. Nasarudin Latif mendefinisikan:

Dakwah adalah sebagai setiap usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia yang lainnya untuk beriman dan mentaati Allah SWT, sesuai dengan garis-garis aqidah dan syari'at.¹⁸

b. Prof. Toha Yahya Oemar mengatakan bahwa:

Dakwah adalah "mengajak manusia dengan cara bijaksana dengan jalan yang benar sesuai dengan jalan yang benar sesuai dengan perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akherat.¹⁹

c. Drs. H. Masdar Hilmy mengatakan bahwa:

Dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran Allah (islam) termasuk amar ma'ruf nahi munkar bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.²⁰

17). Drs. Slamet Muhaemin Abda, Op-Cit, hlm. 30-31

18). HSM. Nasarudin Latif, Teori Dan Praktek Dakwah-Islamiah, Firma Dara, Jakarta, tt, hlm. 11

19). Toha Yahya Oemar, Ilmu Dakwah, Wijaya, Jakarta, 1976, hlm. 1

20). Drs. H. Masdar Hilmy, Dakwah Dalam Alam Pembangunan, CV. Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 31

- d. Dr. H. Aboe Bakar Atjeh mengatakan bahwa dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik.²¹
- e. Dr.H. Hamzah Ya'kub mengatakan, dakwah adalah me ngajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan un tuk mengikuti petunjuk Allah dan RasulNya.²²

Sebenarnya masih banyak lagi definisi dakwah akan tetapi beberapa takrif di atas, sudah dapat meng gambarkan tentang pengertian dakwah.

Pada dasarnya beberapa defenisi dakwah di atas, adalah mempunyai pengertian yang sama, meskipun berbe da dalam teksnya. Hal ini dapat dilihat pada setiap definisi dakwah mempunyai tiga unsur pengertian pokok:

1. Dakwah adalah proses pengajaran islam dari sese orang kepada orang lain.
2. Penyampaian ajaran islam tersebut bisa berupa amar ma'ruf (ajakan kepada kebaikan) dan nahi munkar (mencegah segala bentuk kemaksiatan).
3. Usaha tersebut dilakukan dengantujuan terbentuknya

²¹ H. Aboe Bakar Atjeh, Beberapa Catatan Mengenai Dakwah Islamiyah, Firma Dara, Jakarta, hlm. 11

²² Dr. H. Hamzah Yakkub, Publisistik Islam Tehnik Dakwah & Leadership, Cet. III, CV. Di Ponegoro, Bandung, 1986, hlm. 13

Suatu individu dan masyarakat yang kuat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran islam.

Adapun arti daripada dakwah bil hal (dakwah fi'liyah) itu sendiri adalah suatu metode penyampaian dakwah dengan tidak menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan tetapi berupa tindakan nyata. Dakwah bil hal ini bisa berupa uswatun hasanah (turi tauladan atau percontohan), bakti sosial, wisata dakwah, perkawinan dan lain sebagainya.²³

Cara dakwah bil hal yaitu menerapkan dakwah secara langsung, misalnya dengan memberi contoh-contoh dan teladan yang baik terhadap obyek dakwah. Metode dengan uswatun khasanah ini telah banyak membawa keberhasilan dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW.

Dakwah melalui percontohan yang selama ini dilaksanakan adalah aktif melaksanakan shalat berjama'ah ke masjid serta berbuat baik sesama tetangga.

Pada dasarnya beberapa definisi dakwah diatas adalah mempunyai pengertian yang sama meskipun berbeda dalam teks (redaksi) nya. Sebenarnya masih banyak lagi definisi dakwah yang dikemukakan oleh para ahli yang lain, akan tetapi beberapa definisi diatas sudah dapat memberikan suatu gambaran tentang pengertian dakwah.

²³). Drs. Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Biro penerbit-IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1991, hlm. 87.

Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran islam kepada orang lain dengan berbagai cara yang bijaksana untuk terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengenalkan ajaran islam dan semua lapangan kehidupan.

2. Hukum Dakwah

Dalam kehidupan masyarakat, dakwah berfungsi memajukan kehidupan masyarakat yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan bahagia. Dakwah merupakan aktivitas yang penting dalam islam. Dengan dakwah, islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Ajaran islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang membawa kehancuran.

Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan pekerjaan yang hanya diangan-angan saja, akan tetapi merupakan suatu pekerjaan yang telah dibebankan wajibkan bagi orang-orang islam. Dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul banyak sekali ayat yang secara tersurat maupun tersirat yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan dakwah.

Dengan demikian dakwah adalah segala bentuk usaha (aktivitas) yang disampaikan kepada umat manusia demi terwujudnya manusia dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan benar dalam segala aspek agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat.

Dan orang yang berdakwah atau orang yang mengajak kepada jalan Allah, maka orang tersebut akan mendapat ridlo dari Allah, serta surga pada hari kiamat. Hal ini dijelaskan pada Surat Ali Imran ayat 104.

والتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون
عن المنكر واولئك هم المفلحون

Artinya: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung"²⁴

Pada ayat diatas tersebut, dengan tegas dikatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar akan selalu mendapatkan keridlaan Allah karena berarti mereka telah menyampaikan ajaranNya kepada manusia dan meluruskan perbuatan yang tidak benar kearah aqidah dan akhlaq islamiyah.

Selemah lemah manusia, setidaknya setidaknya ia masih tetap berkewajiban menolak kemunkaran dengan hatinya, kalau dia masih ingin dianggap Allah sebagai hamba yang masih memiliki iman.²⁵

²⁴). Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. hlm. 93.

²⁵). N. Natsir, Fiqhuddawah, YKPI Ramadhan, 1984, Semarang; hlm. 113.

Berangkat dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits hadits Nabi yang telah penulis paparkan tersebut di atas, seluruh ulama' sepakat bahwa hukum da'wah adalah wajib. Yang masih dipersoalkan adalah kewajiban itu dibebankan pada setiap individu muslim (Fardhu Ain) atau kewajiban itu hanya dibebankan pada sekelompok orang saja dari umat islam secara keseluruhan (Fardhu Kifayah). Perbedaan pendapat ulama' mengenai hukum berda'wah tersebut disebabkan perbedaan cara pemahaman mereka terhadap dalil-dalai naqli disamping adanya kenyataan kondisi tiap-tiap muslim yang berbeda-beda pengetahuan dan kemampuannya.

Oleh karena itu berikut ini disebutkan masing masing pendapat beserta alasan-alasannya mengenai hukum berda'wah, antara lain:

Menurut A. Hasmy bahwa sesungguhnya da'wah bukanlah tugas kelompok khusus, dimana orang lain terbatas dari tanggung jawab. Setiap muslim juga dibebankan untuk memindahkan keimanan ke dalam hati yang kosong, menuntun orang yang bingung dan berpulang ke jalan Allah yang lurus. Karena itu da'wah ke jalan Allah sama dengan sejumlah keutamaan jiwa dan tugas-tugas syari'at yang tidak khusus dengan seorang muslim saja, tetapi mencakup semua muslim.²⁶

Menurut M. Natsir bahwa tugas da'wah adalah tugas umat secara keseluruhan bukan monopoli untuk golongan yang disebut ulama' atau cerdik cendikawan. Bagaimana suatu masyarakat akan mendapat kema

²⁶ A. Hasmy, Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 161-162

juan apabila para anggotanya yang mempunyai ilmu sedikit atau banyak baik ilmu agama atau ilmu dunia tidak bersedia mengembangkan apa yang ada pada mereka untuk sesamanya. Dan bagaimana pula suatu masyarakat akan selamat bila sama-sama anggotanya diam, masa bodoh terhadap kemungkaran. Tiap - tiap bibit kemungkaran mempunyai daya gerakanya sendiri. Di waktu masih kecil dia ibarat sebutir bara yang tidak sukar mematikannya, akan tetapi bila ia di biarkan besar akan susah untuk memadamkannya.²⁷

Lain halnya dengan pendapat Muhammad Ghozali dalam bukunya "Ma'allahi Fid Da'wah Wad Du'ah" yang dikutip oleh A. Hasjmy, mengatakan bahwa:

Kaum Muslimin haruslah membagi kegiatan untuk sempurnanya risalah da'wah ini, Sekarang kita berada dalam suatu zaman di mana spesialisasi ilmu pengetahuan menjadi ciri khasnya. Dalam zaman ini ilmu pengetahuan telah berkembang begitu rupa, yang sulit bagi seseorang untuk mendalami semuanya, sekalipun kecerdasan otaknya luar biasa. Karena itu, kalau nyatanya ilmu pengetahuan telah melaut demikian rupa, patutlah sekelompok ulama' mengkhususkan diri dengan mempelajari da'wah Islam saja. Mereka yang menghabiskan usianya untuk maksud inilah yang patut disebut Du'ah Ilallah.²⁸

Dengan demikian, kedua pendapat yakni pendapat yang mengatakan bahwa da'wah itu wajib 'ain maupun yang mengatakan bahwa da'wah adalah wajib kifayah sama-sama mempunyai argumentasi naqliyah dan aqliyah. Akan tetapi secara aqliyah, keduanya mengandung beberapa persoalan. Kalau da'wah wajib ain, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua orang Islam itu karena keterbatasan ilmu dan ketidakmampuan lainnya dapat melaksanakan da'wah. Sedangkan kalau da'wah

²⁷) M. Natsir, Op Cit, hlm. 111

²⁸) A. Hasjmy, Op Cit, hlm. 163-164

wajib kifayah akan berakibat melemahnya tanggung jawab setiap individu muslim untuk mengemban amanat da'wah, padahal kelebihan islam dibanding dengan agama-agama lain dalam penyebaran agama adalah kelebihan pada tanggung jawab setiap individu muslim sebagai da'i dalam segala lapangan profesi tanpa diorganisir oleh organisasi da'ah.

Berdasarkan fakta dan beberapa argumentasi di atas sangat memperkuat pendapat bahwa da'wah adalah wajib ain. Terutama jika kita hubungan dengan hadits riwayat Imam Muslim tentang kewajiban setiap muslim untuk memerangi kemunkaran. Kewajiban da'wah bagi setiap muslim tersebut hanyalah terbatas sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak menuntut manusia di luar kemampuannya. Sedangkan orang yang tidak mampu berda'wah karena berbagai sebab tidak terkena kewajiban ini sebagaimana gugurnya kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya.

3. Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Kegiatan Da'wah Bil Hal.

Selama ini partisipasi terutama diperlakukan sebagai masukan bagi proses dakwah bil hal, sebagai suatu prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan dakwah bil hal. Bahkan di negara kita, karena pentingnya partisipasi sebagai masukan pembangunan ditetapkan di

dalam GBHN. Partisipasi diartikan sebagai dana dan daya yang dapat disediakan atau dapat dihemat sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat desa terhadap berlangsungnya kegiatan dakwah atau keterlibatannya masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pelaksanaan dakwah bil hal yang dilakukan oleh para da'i.

Oleh karena itu untuk perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi, cara untuk menggerakkannya adalah melalui :

1. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada.
2. Dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya respons yang dikehendaki.
3. Dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki secara berlanjut.

Perlu diketahui juga, bahwa selain dari cara yang disebutkan di atas, ada cara lain untuk menggerakkan masyarakat yaitu dengan adanya gotong royong, sebagaimana Islam sendiri juga mengajarkan hal yang demikian. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta kegotong royongan itu diwajibkan berpegang teguh kepada tali Allah (agama Allah) dan jangan bercerai berai,

Sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam surat Ali imran ayat 103 yang berbunyi:

واعصموا بجملة الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالق بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون .

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semua kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk" 29

Kedua tersebut kemudian ditingkatkan kepada pembangunan masyarakat, bahwa sesungguhnya Dia (Allah) tidak merubah apa-apa yang ada pada suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri merubah apa-apa yang ada padanya, seperti ayat tersebut diatas mencerminkan kegotong royongan usaha bersama untuk merubah sesuatu yang ada pada suatu masyarakat (kaum). Dan inilah yang dikehendaki dalam kegiatan dakwah bil hal.

Dalam hal ini ada beberapa bentuk dalam partisipasi, diantaranya adalah:

29). Departemen Agama RI, Alqur'an Dan Terjemahannya, hlm 93.

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact)change) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengizinkan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat, dan partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
4. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauhmana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,²⁰

meskipun demikian perlu diketahui juga bahwa, bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan dapat dikembangkan, tentu saja tergantung dengan sistem kemasyarakatan yang dianut, dalam hal ini adalah

²⁰ Dr. Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat, PN. Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 103-104

masyarakat nelayan yang dihadapi, sehingga pembinaan kegiatan usaha melalui dakwah bil hal. Karena dakwah bil hal merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam kegiatan membangun yang bersifat sosial, politik maupun ekonomi. Sebab dakwah bil hal sanggup mengubah nasib bersama, dari buruk menjadi baik, dan dapat memenuhi keperluan bersama serta mendidik dalam dada manusia rasa tanggung jawab. Oleh karena itu salah satu tujuan perencanaan dakwah pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja. Dengan tujuan ini berarti pula usaha meningkatkan keterlibatan masyarakat, selain tujuan-tujuan lain misalnya peningkatan produksi.

Dalam hal ini SB. Joedono mengemukakan bahwa, masalah partisipasi dalam pembangunan adalah "masalah kesempatan untuk memproduksi dan menikmati pendapatan dari hasil produksi"³¹

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan atau partisipasi tersebut terdapat dua cara dalam perencanaan dakwah bil hal. Adapun cara yang pertama adalah mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat nelayan yang serasi untuk kepentingan pencapaian tujuan dakwah bil hal. Pada pokoknya keterlibatan masyarakat lebih didasarkan atas hubungan satu arah dari atas kebawah.

³¹⁾ S.B. Joedono, Partisipasi Dalam Proses Pembangunan Nasional, PN. Prisma, IV. 1972, hlm. 152.

Sedangkan cara yang kedua, dengan meningkatkan oto-aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat sendiri. Terutama ditujukan pada sektor usaha swasta, termasuk dalam hal ini sektor luas dalam kegiatan masyarakat di bidang perikanan (nelayan), dunia usaha dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan berbagai hal kebijaksanaan, penciptaan iklim yang sehat, penggunaan mekanisme pasar dan harga, dan pelaksanaan dakwah bil hal bersifat pendewasaan masyarakat nelayan dalam keterlibatannya untuk membangun masyarakat desa.

Dengan demikian masyarakat tergerak untuk berpartisipasi itu melalui:

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan (nelayan).
2. Partisipasi itu memberikan mamfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan (nelayan).
3. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi - masyarakat ternyata berkurang jika mereka t tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Konsep partisipasi mengandung makna yang amat luas dan arti yang dalam. Dalam proses kegiatan dakwah bil hal, partisipasi berfungsi sebagai "masukan -

dan pengeluaran".

Sebagai masukan, partisipasi berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Sedangkan sebagai pengeluaran, partisipasi dapat digerakan atau dibangun. Dalam hal ini berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya, seperti pembangunan ekonomi, atau pendidikan ketrampilan berproduksi, mengelola produksi, pasar dan mengelola pemasaran, business ekonomi, dan jasa, pembentukan KUD, Syirkah (Bank Islam) serta wiraswasta yang lain. Yang tujuannya memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah masyarakat yang di bina dalam setting tertentu. Tujuan yang lain, dan ini yang paling, ialah mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan stratifikasi umat, dari level bawah di arahkan ke level menengah keatas.

Namun demikian harus diakui bahwa dakwah bil hal yang dilakukan oleh seorang da'i dan da'i tersebut sering kali harus bertindak sebagai unsur pembaharu, pembimbing dan pengarah melalui perencanaan - dakwah. Kecuali itu perlu dikembangkan kemampuan- kemampuan masyarakat nelayan terutama organisasi masyarakat dan perlembagaan ekonomi keuangan.

Hal ini disebabkan oleh karena proses dakwah bil hal sering kali memerlukan pembaharuan orientasi, nilai nilai, sikap maupun struktur kelembagaan dalam masyarakat yang kondusif untuk pembangunan desa. Misalnya dalam pembinaan wirausaha.

Dalam hal ini perlu diperhatikan khusus kepada golongan-golongan masyarakat tertentu yang dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dakwah bil hal itu perlu diperhatikan - atau diperhatikan dalam perencanaan. Seperti misalnya golongan muda, pengusaha, mahasiswa, wanita, cendekiawan, Pemimpin-pemimpin Agama dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dakwah bil hal dapat membangkitkan rasa percaya pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Rasa ini mendorong tumbuhnya prakarsa dan kegiatan bersama. Dan rasa tanggung jawab sebagai salah satu kualitas lainnya masyarakat desa (nelayan) yang berkemampuan berkembang - secara mandiri tumbuh secara sadar dan bebas menerima - suatu tugas.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan dakwah bil hal adalah antara lain, lewat tradisi tentang tradisi masyarakat di daerah Paciran ini ada pelbagai tradisi yang mereka miliki, mulai dari tradisi yang bersifat islam maupun yang tidak islami.

Tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam tidak ditentang secara langsung atau dengan cara yang keras, melainkan dengan cara yang halus, mula-mula tempatnya dipindah kemudian isi do'anya ditambah dengan unsur - unsur yang islami misalnya dalam hal penangkapan ikan.

Masyarakat Paciran dulu kalau menjelang musim hujan disertai angin kencang biasanya para nelayan itu membawa tumpeng dan sesaji kepala sapi ke tengah-tengah laut, dengan harapan agar diberi keselamatan oleh yang baurek so laut, sehingga perahu atau kapalnya tidak tenggelam dan lain-lain. Akan tetapi semacam itu sekarang tidak nampak lagi, mereka sekarang hanya membuat selamatan di rumah dan mengundang tetangga kanan kiri juga sudah tidak membuat sesaji lagi seperti dulu. Pada acara tersebut biasanya mengundang para kyai, kemudian kyai tersebut menerangkan tujuan hajat itu dan di saat inilah biasanya para kyai itu menambahi dengan unsur-unsur yang islami yaitu dengan kata-kata "Sedekah ini untuk mengucapkan syukur kepada Allah, mudah-mudahan sedekah ini diterima oleh Allah, dan semoga Allah mendekatkan rezikinya dan malapetakanya, yang disaksikan oleh air, angin, matahari dan api, serta mudah-mudahan Allah juga memberikan keselamatan terhadapnya. Cara mendo'akan semacam di atas tadi, sekarang sudah mentradisi di daerah Paciran ini, sehingga masyarakat akhirnya mengikuti cara yang di

terapkan secara bertahap itu, dan tempatnya kadang di masjid dan kadang di rumah-rumah penduduk secara giliran serta kadang-kadang mengundang muballigh dari luar daerah Paciran.

Adapun dana dalam pelaksanaan acara tersebut adalah hasil dari sumbangan para nelayan istilanya urunan. Dan inilah yang dinamakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dakwah bil hal. Sedangkan bentuk sumbangan itu bermacam-macam, ada yang berupa makanan, tempat, terop, alat pengeras, ada yang berupa uang tunai dan lain-lain. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan do'a. Dan do'a yang sering atau selalu dibaca dalam selamatan itu adalah: Do'a keselamatan yang berbunyi "Allahu ma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiatan fil jasadi waziadatan fil ilmi wabarokatan firrizeki...., do'a ini yang selalu dibaca sebab mudah dihafal dan sesuai dengan hajat mereka (hasil wawancara KH. Salamun 16 April 1996).

Disamping itu ada bentuk lain yaitu keikutsertaann dalam pembentukan organisasi lembaga keuangan masyarakat dan dalam organisasi ini diadakan kursus ketrampilan seperti zuri (merakit jaring), pembuatan kapal dan lain - lain. Jadi pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan dakwah tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat setempat.

C. Korelasi Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Dengan Tingkat Partisipasinya Dalam Kegiatan Dakwah Bil Hal.

1. Korelasi Status Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Miskin Terhadap Kegiatan Dakwah Bil Hal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh manusia adalah memerlukan biaya, baik biaya itu dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Demikian juga halnya dengan adanya kegiatan dakwah secara umum, khususnya biaya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal ini.

Bagi keluarga yang mampu dan mempunyai pendapatan yang besar mungkin tidak ada masalah, akan tetapi bagi keluarga yang miskin dengan pendapatan yang relatif kecil dan kadang-kadang pendapatan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anggota keluarga, mereka cenderung mempunyai pola pemenuhan kebutuhan keluarga yang spesifik. Namun kebutuhan makan, pakaian, dan perumahan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila pendapatan keluarga yang digunakan memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga tersebut masih tersisa maka kebutuhan lainnya seperti halnya berpartisipasi dalam dakwah bil hal dan lain sebagainya baru dapat dipenuhi. Dan apabila ternyata tidak ada pendapatan yang sisa, maka partisipasinya dalam kegiatan dakwah bil hal dapat

berkurang, padahal kegiatan tersebut sangat penting bagi setiap kaum muslimin. Meskipun status sosial ekonomi masyarakat bukan merupakan faktor yang mutlak dalam kegiatan dakwah bil hal, karena kemauan seseorang itu juga mempunyai peranan yang besar. Namun demikian status sosial ekonomi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap kegiatan tersebut seperti pembangunan masjid atau mushala serta sarana atau alat - alat yang lainnya.

Demikian halnya dengan kehidupan keluarga nelayan yang bersahaja. Mereka tidak dapat menuntut berapa hasil yang ingin diperoleh dari jerih payah sehari an menangkap ikan di laut. Kadang-kadang alam memberinya hasil yang berlimpah sehingga pendapatan yang diperoleh juga banyak, tetapi tidak jarang mereka pulang kerja tanpa hasil sama sekali. Kondisi seperti ini, dimana sumber pendapatan nelayan yang sepenuhnya tergantung kepada kemurahan alam dan hal semacam ini membuat pendapatan nelayan bersifat fluktuatif (tidak tetap) menimbulkan kesulitan dalam merencanakan untuk pengeluaran dalam partisipasi kegiatan dakwah bil hal.

Keluarga nelayan miskin dengan pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Rp. 20.000 00 perkapita perbulan, tentu mengalami kesulitan dalam mengalokasikan pendapatan yang ada untuk kepentingan dakwah bil hal. Dengan biaya hidup Rp. 20.000.00

per kapita per bulan kemungkinan besar akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar, dimana urutan jenis kebutuhan yang dianggap penting bagi setiap orang adalah "pangan, perumahan, kesehatan, sandang, transportasi, partisipasi dakwah dan lain lainnya."³²

Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling penting, oleh karena itu sebagian besar pendapatan keluarga dialokasikan untuk biaya konsumsi atau pangan. Dengan memperhitungkan harga barang-barang kebutuhan pokok saat ini, dana sebesar Rp. 20.000; 00 kemungkinan besar akan habis untuk biaya makan selama satu bulan, padahal kebutuhan hidup tidak hanya makan saja, sandang juga sangat diperlukan, sehingga bila terdapat sisa dari biaya makan maka kebutuhan yang akan dipenuhi terlebih dahulu adalah perumahan, kesehatan, dan sandang, sedangkan untuk berpartisipasi menunggu setelah kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka orang yang hidup dalam keluarga miskin kemungkinan besar akan mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal agak sulit, sebab dalam kegiatan dakwah bil hal memerlukan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya perlengkapan - perlengkapan

³²⁾Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers (ed). ,
Op Cit, hlm. 43.

Masjid dan Mushala dalam lain sebagainya yang kesemuanya itu apabila dikalkulasikan secara cermat bisa mencapai nilai yang sama besar dengan nilai yang dipergunakan untuk biaya konsumsi sehari-hari. Sedangkan untuk makan saja, kondisi keuangan keluarga masih banyak kekurangan apalagi untuk ikut berpartisipasi dakwah yang biayanya lebih banyak lagi. Tentunya akan merasa kesulitan dan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga tidak ada alternatif lain keluarga nelayan miskin kecuali mengharapkan anggota keluarga (anaknya) untuk ikut bekerja sebagai nelayan maupun kerja lainnya, atau dengan kesadarannya sendiri anak tersebut bekerja untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

2. Korelasi Status Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan menengah Terhadap Kegiatan Dakwah Bil Hal.

Status sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan yang cukup besar terhadap peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal. Demikian halnya dengan keluarga nelayan golongan menengah yang telah bebas dari masalah kemiskinan. Secara teoritis anggota keluarga dari golongan ini akan mampu melangsungkan kegiatan dakwah bil hal bila dibandingkan dengan anggota keluarga golongan miskin. Dengan pendapatan yang cukup, seseorang dapat mencurahkan perhatiannya

yang lebih mendalam kepada kegiatan dakwah bil hal.

Dalam hal ini W. A. Gerungan berpendapat bahwa: Dengan perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak didalam keluarga itu lebih luas, ia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk memperkembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat diperkembangkan bila tidak ada alat-alatnya.³³

Seperti yang telah kita ketahui bahwa, salah satu alat yang diperlukan untuk membantu mengembangkan masyarakat maju dengan berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal adalah masjid dan mushala merupakan lembaga yang dinilai efektif untuk membantu perkembangan Iman seseorang.

Status sosial ekonomi keluarga dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat mempengaruhi harapan keluarga untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa keluarga menengah adalah mereka yang pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Rp. 20.000;00 s/d Rp. 50.000;00 per kapita per bulan.

Bagaimanapun juga biaya hidup yang jumlahnya antara Rp. 20.000;00 s/d Rp.50.000;00 per kapita per

³³⁾ W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, PT. Eresco, Bandung, 1991, hlm. 181.

bulan adalah sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, sehingga sisa biaya untuk konsumsi tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lainnya yang dalam hal ini adalah kesehatan. Kebutuhan kesehatan agaknya akan digeser oleh kebutuhan partisipasi kegiatan dakwah dalam hal prioritas pemenuhannya, karena bagi keluarga yang cukup uang mereka akan mampu memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta dapat menikmati waktu senggang dengan sebaik-baiknya sehingga kesehatan anggota keluarga tetap terjaga dan oleh karenanya pendapatan yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan lainnya, termasuk untuk kegiatan dakwah bil hal.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal dari keluarga nelayan menengah lebih besar dari pada anak dari keluarga nelayan miskin.

3. Korelasi Status Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Yang Mampu Terhadap Kegiatan Dakwah Bil Hal.

Dengan pendapatan keluarga yang besar, segala kebutuhan anggota keluarga akan dapat terpenuhi baik berupa kebutuhan barang maupun jasa seperti kesehatan dan pendidikan anak-anak serta partisipasi dalam kegiatan dakwah. Di samping itu untuk beribadah kepada

Allah agar dapat memperkuat keimanan dan menanam iman itu kedalam setiap jiwa orang muslim. Ibadah sangat penting bagi manusia seperti pentingnya air bagi tumbuhan, dan iman seseorang akan bertambah kalau ibadah itu dilaksanakan.³⁴

Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa keluarga yang mampu atau kaya dapat memberikan peluang yang besar untuk berpartisipasi untuk melangsungkan kegiatan dakwah bil hal, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan dakwah bil hal memerlukan biaya yang sangat besar. Tetapi bagi keluarga yang mampu tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah hanya pilihan materi yang sesuai untuk masyarakatnya. Dalam hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat, sebab jika masyarakat tersebut sudah mengambil keputusan tidak mengikuti kegiatan tersebut, maka kekayaan keluarga yang melimpah tidak akan mampu menjadikan masyarakat tersebut mau melangsungkan kegiatan dakwah bil hal, kecuali jika keluarga kaya tersebut mampu membangkitkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal.

Secara teoritis faktor sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dakwah bil hal akan tetapi tidak mutlak karena faktor yang utama

³⁴Dr. Abd. Karim Zaidan, Dasar-Dasar Ilmu Dakwah, Media Dakwah, 1979, hlm. 51

dalam kelangsungan kegiatan dakwah bil hal tersebut adalah faktor kemauan atau hidayah pada masyarakat - tersebut.

Bagi keluarga nelayan yang mampu dengan pendapatan yang telah cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari Rp. 50.000,00 per kapita perbulan sangat memungkinkan bagi anggota keluarga untuk melangsungkan partisipasi dalam kegiatan dakwah bil hal, sebab dengan biaya sebesar itu tidak mungkin habis hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja sehingga sisa biaya konsumsi juga jumlahnya banyak dan dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya termasuk kegiatan dakwah.

Keluarga yang hidup dalam situasi yang mampu, maka kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah finansial yang serius. Oleh karena itu keluarga dapat mencurahkan segenap kemampuannya dalam menggali potensi yang dimiliki dengan bantuan tenaga da'i yang profesional dan perlengkapan dakwah yang lengkap sehingga keluarga dapat mengikuti kegiatan dakwah dengan penuh semangat. Sebagai keluarga yang mampu tentu saja ia tidak mengalami kesulitan dalam memilih alat-alat yang tergolong ideal untuk kegiatan dakwah bil hal meskipun harus membayar dengan biaya yang mahal.

Dengan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap berlangsungnya kegiatan dakwah bil hal, tentu saja orang-orang akan semakin termotivasi untuk selalu ikut berpartisipasi sehingga ia tidak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan dakwah bil hal tersebut.